

PERAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR UNIT DONOR DARAH PMI DI KOTA MEDAN

Angela Novenita L.Tobing¹, Artha Tobing², Jonson Rajagukguk³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: angela@student.uhn.ac.id

Email: artha.tobing@uhn.ac.id; jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe and describe the Role of the Indonesian Red Cross (PMI) in Improving Accessibility of Public Services at the PMI Blood Donor Unit Office in Medan City. The type of research used is qualitative research with a descriptive nature, descriptions of interview results and documentation studies so that it is able to describe various things related to the Role of the Indonesian Red Cross (PMI) in Improving Accessibility of Public Services at the PMI Blood Donor Unit Office in Medan City. The data obtained were analyzed qualitatively and described in descriptive form. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Indonesian Red Cross (PMI) in improving Accessibility of Public Services at the PMI Blood Donor Unit Office in Medan City has not been effective enough. This is caused by several obstacles for PMI in improving accessibility of public services at the blood donor unit office, usually including limited resources, such as the number of medical personnel, equipment, and budget. In addition, the lack of public awareness of the importance of blood donation as well as logistical constraints and locations that are difficult to reach are also challenges. These factors can hinder PMI's efforts to provide optimal and equitable services to the community.

Keywords: Role of PMI, Blood Donor, Accessibility, Public Service.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang Peran Palang Merah Indonesia (PMI) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di kantor Unit Donor Darah PMI Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deksripsi, uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi sehingga mampu mendeskripsikan berbagai hal berkaitan dengan Peran Palang Merah Indonesia (PMI) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayan Publik Di kantor Unit Donor Darah PMI Di Kota Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta di uraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Kantor Unit Donor Darah PMI Di Kota Medan belum cukup efektif. Di sebabkan oleh beberapa hambatan PMI dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di kantor unit donor darah biasanya meliputi keterbatasan sumber daya, seperti jumlah tenaga medis, peralatan, dan anggaran. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah serta kendala logistik dan lokasi yang sulit di jangkau juga menjadi tantangan. Faktor-faktor ini dapat menghambat upaya PMI untuk memberikan pelayanan yang optimal dan merata kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peran PMI, Donor darah, Aksesibilitas, Pelayanan publik.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redsigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

PENDAHULUAN

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, dengan memiliki tantangan tersendiri dalam menyediakan akses pada pelayanan. Menghadapi permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dengan pertumbuhan populasi yang cepat, ketimpangan ekonomi, serta kondisi geografis dan sosial yang beragam di dalam kota. Salah satu entitas yang memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi tantangan ini adalah palang merah Indonesia (PMI), organisasi kemanusiaan yang berdedikasi untuk memberikan bantuan kesehatan dan sosial kepada masyarakat.

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan suatu badan aspek sosial serta manusiawi Indonesia. Palang Merah Indonesia (PMI) mempunyai 7 prinsip aksi Palang Merah serta bulan sabit merah global, ialah manusiawi, kesetaraan, kesukarelaan, independensi, aliansi, netralitas, serta universalitas. PMI terhambur di 34 area di tingkat provinsi serta 408 agen PMI ditingkatkan kota atau kabupaten di Indonesia. PMI tidak mensupport golongan politik, suku bangsa, etnik, ataupun agama. PMI melaporkan kalau beberapa besar korban menginginkan dorongan buat membenarkan jiwa mereka nyaman. Darah ialah bagian berarti dari badan, membagikan nutrisi serta zat asam ke semua alat badan, tercantum alat berarti seperti otak, jantung, ginjal, alat pernapasan serta batin. bila darah kekurangan nutrisi, keinginan zat asam dari organ organ ini tidak terkabul, yang bisa menimbulkan kematian. Namun badan kesehatan di dunia mengatakan minimal persediaan darah dua persen persetiap negara. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 sebanyak 32,56 juta jiwa, menurut PMI persediaan darah minimal sekitar 5 juta kantong darah per tahun. Kenyataannya, PMI belum bisa memenuhi ketersediaan darah per tahunnya. Indonesia menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan 5,1 juta kantong darah, sedangkan jumlah pendonor sebanyak 4,1 juta kantong darah. Sebagai hasil dari ketersediaan darah, kematian terjadi pada pasien yang membutuhkannya.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, baik pusat, daerah maupun lingkungan usaha milik Negara. PMI, sebagai bagian dari gerakan palang merah dan bulan sabit internasional, memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik pada unit darah PMI di kota Medan. Dengan jaringan relawan yang luas, sumber daya yang terorganisir, dan komitmen untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, PMI dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan lembaga kesehatan lainnya dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan publik di tingkat komunitas.

PMI selalu mempunyai tujuh prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia, palang merah Indonesia tidak memihak golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Palang merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, PMI harus dapat menentukan ciri khas peranan sosialnya secara tepat, tidak terlepas dari tugas-tugas konkrit yang telah ditentukan seperti penyelenggaraan transfusi darah, pendidikan dan pelatihan, pembinaan terhadap generasi muda yang peduli terhadap kemanusiaan, peningkatan kemampuan kesiagaan dalam menghadapi bencana alam dan lain sebagainya (Tiwi Widastuti¹). Sebagai organisasi kemanusiaan, palang merah Indonesia harus terus berkembang dan bersiap menghadapi zaman baru, tantangan baru, dan tentu saja iklim baru. Semua ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat setempat. Kita perlu terus terinovasi, melahirkan ide dan mengimplementasikan ide-ide baru agar palang merah Indonesia dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Dalam organisasi tingkat kesuksesannya tidak lepas dari peran dari sumber daya manusianya. Baik anggota maupun para pengurus dalam sebuah organisasi mempunyai peran yang sangat penting, terkhusus untuk pengurus inilah yang menjalankan sistem roda organisasi tersebut. Setiap organisasi pasti membutuhkan pengurus yang dapat menjalankan tugas-tugas kepengurusan dan dapat mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya di dalam organisasi. Selain itu, memiliki jiwa loyalitas terhadap organisasi dan dapat membawa organisasi menjadi lebih baik, sesuai dengan visi dan misi PMI kota medan yang mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Namun di dalam pemilihan pengurus PMI kota medan para jajaran PMI kota medan kurang mengetahui dengan baik setiap calon pengurus yang mencalonkan diri ataupun dicalonkan, sehingga cukup sulit untuk menentukan pilihan yang tepat untuk menduduki posisi pengurus PMI kota Medan. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tentang peran palang merah indonesia (pmi) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di kantor unit donor darah pmi di kota medan.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif menurut Creswell (2019:2) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dalam setting alamiah. Lokasi Penelitian mengenai peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di kantor unit donor darah PMI di Kota Medan berlokasi di Kantor Palang Merah Indonesia di jl.perintis kemerdekaan No.37,Gaharu,Kec.Medan Timur,Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan,yakni dari bulan Mei 2024 hingga bulan juli 2024.

PEMBAHASAN

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai peran masing – masing, peran tersebut membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Peran yang dilakukan oleh setiap individu dapat menentukan apa yang akan dipercaya, tindakan apa yang akan ia lakukan, dan peran juga dapat mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran (*Role*) adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen, 1992:76). “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, jika seseorang melaksanakan suatu peranan”. Kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan keduanya saling tergantung artinya tidak dapat dipisahkan keduanya saling tergantung artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Seperti halnya status, setiap orang mempunyai berbagai macam peran yang berasal dari pola pergaulan. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi sosial. Sementara peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.

Menurut Lavinson, paling sedikit peran mencakup tiga hal, yaitu :

- Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian peran di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

aspek dinamis yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi dapat disinetrisikan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu lembaga.

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu titik strategis dalam membangun praktik pemerintahan yang baik. Menurut Ientve dalam Safroni (1990: 188), produk dari pelayanan publik dalam negara demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indikator sehingga bisa dikatakan berkualitas, yaitu sebagai berikut.

1. *Responsiveness*, yaitu daya tanggap penyedia pelayanan baik terhadap harapan, keinginan, aspirasi, maupun tuntutan pengguna layanan.
2. *Responsibility*, yaitu yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan organisasi yang telah ditetapkan.
3. *Accountability*, yaitu yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Di Indonesia pelayanan publik telah didefinisikan dan dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, berikut ini :

“segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintah Non- Departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan usaha Milik Daerah. Adapun pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum.”

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1). Yang berbunyi sebagai berikut:

“pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dana atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas layanan merupakan suatu evaluasi yang berfokus, yang mencerminkan persepsi pengguna terhadap dimensi kualitas itu sendiri, yang terdiri dari *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangible*.

Menurut Sinambela, dkk. (2006: 6) pelayanan berkualitas tercermin dari beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

1. *Transparansi*, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
2. *Akuntabilitas*, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan.
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dll.
6. Kesinambungan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik

Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan publik menurut Hutagalung (2021:110-111) yaitu:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi peranan penting dalam pelayanan publik, yang mencakup skill, pengetahuan, sikap, integritas, kapasitas, kemandirian dan kecakapan lain yang mumpuni.

b. Perbaikan sistem

Perbaikan sistem kearah teknologi kekinian, yang akan mendukung proses pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, murah, efisiensi dan tercapai.

c. Perbaikan fasilitas pelayanan

Fasilitas pelayanan publik seperti pendingin, bangku, kursi, kebersihan, kenyamanan serta secara estetika ada cermin enak untuk dipandang atau dinikmati.

d. Adanya jaminan

Jaminan terhadap waktu, biaya, dan kerugian lain yang tidak diperlukan.

e. Pengawasan dari Pimpinan ke Bawahan Pimpinan dapat membangun komunikasi yang sinergisitas untuk tetap memperhatikan dan mengawasi kinerja bawahan agar memberikan pelayanan yang baik sebagai wujud pemerintahan yang baik.

f. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu menjadi kebutuhan masyarakat kekinian sehingga mereka menuntut agar setiap penyelenggara publik bisa menepati janji atau merealisasikan sesuatu yang dikerjakannya.

g. Rasa aman dan bebas dari resiko

Setiap masyarakat tentu berharap akan mendapatkan rasa aman dan tenang pada saat membutuhkan pelayanan publik sehingga terbebas dari resiko lain yang tidak akan membebani.

Indikator Pelayanan Publik

Menurut Dwiyanto dalam Solong & Yadi (2021: 187) ada tiga indikator, yakni :

1. *Responsiveness* atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
2. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pengertian Palang Merah Indonesia (PMI)

Palang merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan Nasional di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas secara sukarela dibidang kemanusiaan. PMI selalu berpegang teguh

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan dan kesemestaan. dan sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) diseluruh Indonesia. Palang merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Palang merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. Palang Merah Indonesia (PMI) juga mewujudkan organisasi kemanusiaan yang professional, tanggap dan dicintai masyarakat diperlukan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Palang Merah Indonesia (PMI) mampu melaksanakan kegiatan pelayanan kepalangmerahan secara tepat, professional, terkoordinasi, menyeluruh dan terpadu sesuai standar mutu dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat.

Kegiatan pelayanan PMI meliputi :

- a. Pelayanan penanggulangan bencana
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan sosial
- d. Pelayanan donor darah
- e. Pelayanan pemulihan hubungan keluarga (*Restoring Family Link*)

Palang Merah Indonesia (PMI) memainkan peran yang sangat penting dalam pelayanan program untuk meningkatkan aksesibilitas di berbagai bidang. Pertama-tama, PMI terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan dengan mendirikan klinik dan pos kesehatan di lokasi yang terpencil dengan kurangnya pelayanan. Dengan Ini memungkinkan masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus melakukan perjalanan jauh. PMI juga aktif dalam pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Mereka mengadakan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit, pola hidup sehat, dan tindakan pertolongan pertama. Dengan memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami, PMI membantu masyarakat untuk lebih memahami cara menjaga kesehatan dan bagaimana mengakses layanan kesehatan yang tersedia. Selain itu, dalam situasi bencana atau krisis, PMI menyediakan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan layanan medis. Mereka membangun pusat-pusat bantuan dan layanan kesehatan di daerah yang terkena dampak bencana untuk memastikan bahwa bantuan dapat mencapai semua orang yang membutuhkan, termasuk mereka yang mungkin sulit dijangkau.

PMI juga berperan dalam mobilisasi sumber daya. Mereka mengorganisir kampanye donor darah untuk memastikan pasokan darah yang cukup di rumah sakit dan fasilitas medis. Selain itu, mereka melakukan penggalangan dana untuk mendukung berbagai program kesehatan dan kemanusiaan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Pelatihan dan pengembangan kapasitas adalah aspek lain dari peran PMI. Mereka memberikan pelatihan kepada relawan dan tenaga medis lokal, meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan perawatan kesehatan, manajemen bencana, dan pertolongan pertama. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan tetapi juga memperluas aksesibilitas layanan kesehatan di komunitas. Terakhir, PMI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kemitraan ini membantu PMI dalam mengakses lebih banyak sumber daya dan memperluas jaringan mereka, sehingga mereka dapat menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI berfungsi sebagai penyedia layanan donor darah yang penting untuk memenuhi kebutuhan pasokan darah di kota Medan. Dengan membuka unit donor darah di berbagai lokasi, PMI mempermudah masyarakat untuk memberikan darah secara sukarela dan rutin. Ini meningkatkan aksesibilitas bagi warga yang ingin berpartisipasi dalam donor darah, serta memastikan adanya stok darah yang cukup di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Selain itu, PMI sering mengadakan kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah, sehingga semakin banyak orang yang terlibat. Semua upaya ini bersama-sama mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan aksesibilitas bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.
2. Di kota Medan, PMI menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di kantor unit donor darahnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa donor darah penting, tidak semua orang merasa termotivasi atau memiliki kesempatan untuk mendonorkan darah mereka secara teratur. Selain itu, lokasi kantor unit donor darah mungkin tidak selalu strategis atau mudah diakses oleh semua orang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang jauh atau tidak memiliki transportasi yang memadai.

Keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di unit donor darah juga bisa menjadi kendala. Misalnya, jika peralatan atau ruangan tidak memadai, proses donor darah bisa menjadi kurang nyaman atau efisien. Ditambah lagi, koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif antara PMI dan masyarakat bisa menghambat upaya untuk menarik lebih banyak donor. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, PMI perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah lokal, untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki fasilitas, dan memastikan bahwa layanan donor darah lebih mudah diakses oleh masyarakat di seluruh kota Medan.

REFERENSI

- Creswell (2019:29). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Creswell. W. J (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Campuran*. Edisi Keempat (Fourth). Pustaka Pelajar.
- Mukarom, H. Zaenal, Laksana, Mahibudin Wijaya. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung:Pustaka Setia
- Amy Y.S. Rhayu,Vishnu Juwono,Krisna Puji Rahmayanti(2014). *Pelayanan Publik Dan E-Government,Sebuah Teori Dan Konsep*
- Azizah, Y., Amin, S., & Maspufah, H. (2024). Digital Marketing Dalam Upaya *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 91-103.
- Cahyadi, R., Rohan, H.H., & Yuanda, R.R. (2021). *Sosialisasi Donor Darah Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Di Desa Jukong Labang Kabupaten Bangkalan Tahun 2020*.
- Dewi, R.R., Kartasurya, M.I., & Mawarni, A. (2017). *Analisis Kebijakan Donor Darah Dan Implementasi Program Rekrutmen Donor Di Unit Donor Darah (Udd Pmi) Kota Pontianak*.
- Dk, I. F. (2021). *Sistem Informasi Permintaan Kantong Darah Pmi Utd Kota Padang Menggunakan Bahasa Pemograman Php Dan Database Mysql* (Doctoral Dissertation, Universitas Putra Indonesia Yptk).
- Fadillah, N., Nurhalizah, S., Yasir, M., Tahria, F., & Usiono, U. (2023). *Kesigapan Palang Merah Indonesia (Pmi) Terhadap Bencana Yang Terjadi Di Kota Medan*.
- Hartini, W.M., Rosyidah, R.A., & Harahap, Y. (2022). *Persepsi Petugas Utd Pmi Kabupaten Kulon*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

- Progo Tentang Kebijakan Pemeriksaan Malaria Didaerah Endemis Malaria. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*.
- Hm, A. M. (2021). *Peranan Program Sipamandaq Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2018* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(2), 97-130.
- Kuswandari, R. (2019). Motivasi Kerja Karyawan Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Peningkatan Pendorong Di Utd Pmi Kabupaten Bondowoso. Praxis*:
- Lestari, S., & Nurman, N. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kegiatan Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Negeri Padang. *Journal Of Civic Education*, 2(4), 211–220
- Putra, D. A. (2021). *Aktivitas Komunikasi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Program Donor Darah Sukarela* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rizma, K. S. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Saputri, S. M., & Sarjono, S. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Donor Darah Berbasis Web Pada Palang Merah Indonesia (Pmi) Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 6(4), 572-583.
- Saputri, S. M., & Sarjono, S. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Donor Darah Berbasis Web Pada Palang Merah Indonesia (Pmi) Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 6(4), 572-583.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

337

